

BAB 1 **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Desa mempunyai hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan serta mengelola berbagai kepentingan yang berkaitan dengan urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut dikenal dengan istilah otonomi desa, yaitu kemampuan desa mengelolah serta mengurus kebutuhan masyarakatnya secara mandiri selaras potensi serta kondisi yang dimiliki. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan semata, tetapi juga bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang berada di dalamnya. Dengan demikian, desa memiliki ruang untuk mengelola potensi, sumber daya, serta kebijakan yang dapat mendukung kesejahteraan warganya secara mandiri.

UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa menetapkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan desa berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika. UU tersebut mengatur komprehensif tata kelola desa, mencakup asas, kedudukan, jenis, penataan, kewenangan, mekanisme pemerintahan, hak-kewajiban desa dan warganya, serta pengelolaan keuangan dan aset desa. (BPK, 2014)

UU mengatur pembangunan desa dan wilayah perdesaan, kerja sama antar desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa, dan pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Undang-undang juga mengatur cara untuk membina dan mengawasi pemerintahan desa. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki posisi yang strategis dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi desa. BUMDes dibentuk sebagai instrumen ekonomi lokal yang berfungsi untuk mengelola, memanfaatkan, serta mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki desa agar tidak hanya

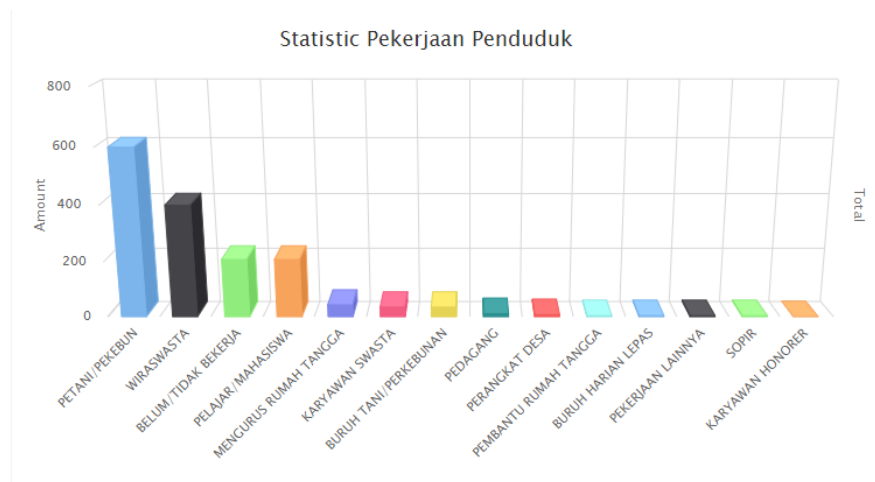
dimanfaatkan secara terbatas, tetapi dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan adanya BUMDes, desa diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sehingga kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Secara lebih luas, BUMDes berperan menjaga keberlangsungan potensi ekonomi desa, mendorong kesejahteraan masyarakat atas pengembangan berbagai unit usaha berbasis pada potensi lokal. Pengelolaan usaha yang dilakukan BUMDes diharapkan mampu membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat struktur ekonomi desa secara mandiri. Selain itu, keberadaan BUMDes juga berperan dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki desa agar dapat dikelola secara lebih produktif dan berkelanjutan. (Junaidi et al., 2021)

Dukungan pemerintah desa terhadap pengembangan usaha desa juga tercermin dari penyertaan modal kepada BUMDes Desa Sombo. Berdasarkan data APBDes, penyertaan modal desa pada tahun 2022 hingga 2024 masih tergolong sangat terbatas, yaitu sebesar Rp1.000.000 per tahun. Namun pada tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan, di mana pemerintah desa mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp149.000.000. Peningkatan alokasi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam memperkuat peran BUMDes sebagai lembaga penggerak ekonomi desa.

Desa Sombo, terletak di Kabupaten Magetan, desa dengan potensi pada sektor perkebunan. Potensi ini tidak hanya dilihat dari luas lahan yang tersedia, tetapi juga dari jenis tanaman perkebunan yang dapat dikembangkan di wilayah ini (Tarigan et al., 2024). Desa Sombo berada di wilayah dengan iklim yang menguntungkan berbagai tanaman perkebunan. Secara geografis, desa ini memiliki lahan yang subur dan topografi yang beragam, yang memberikan lingkungan yang ideal untuk berbagai jenis tanaman seperti cengkeh, kopi, kakao, dan hortikultura lainnya.

Gambar 1.1 Diagram Pekerjaan Penduduk Desa Sombo



Sumber : Website Desa Sombo, 2020.

Berdasarkan data statistik pekerjaan penduduk Desa Sombo tahun 2020, sektor pertanian dan perkebunan merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Jumlah petani/pekebun mencapai sekitar 600 orang, yang menunjukkan bahwa struktur ekonomi desa masih sangat bergantung pada sektor primer. Selain itu, desa ini memiliki komoditas unggulan berupa padi, hasil hutan rakyat, serta tanaman rimpang seperti kencur yang tumbuh cukup melimpah di pekarangan maupun lahan perkebunan masyarakat. Dengan banyaknya hasil padi dan juga kencur yang ada di desa sombo, masyarakat harus dapat memanfaatkan SDA. Tetapi banyak tanaman kencur yang dihasilkan dijual dalam bentuk mentah.

Ketersediaan bahan baku tersebut membuka peluang pengembangan produk olahan berbasis lokal, salah satunya minuman tradisional beras kencur. Produk beras kencur mempunyai nilai ekonomi, budaya karena merupakan minuman herbal tradisional yang dikenal luas di masyarakat. Pengolahan beras kencur menjadi produk siap jual berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas lokal serta membuka peluang usaha bagi masyarakat desa, khususnya kelompok perempuan.

Potensi ekonomi desa juga terlihat dari sektor pertanian, khususnya tanaman rimpang yang menjadi bahan baku produk olahan masyarakat. Data produksi menunjukkan bahwa pada tahun 2022 produksi kencur mencapai sekitar 1.405,56 kg. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi sekitar 1.422,22 kg, dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi sekitar 1.433,33 kg. Peningkatan produksi

ini menunjukkan bahwa ketersediaan bahan baku lokal cukup stabil dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi.

Selain memiliki potensi ekonomi desa yang cukup besar, kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sombo juga menunjukkan berbagai fenomena yang menarik untuk dikaji. BUMDes “Blego Asri” dibentuk sebagai lembaga ekonomi desa yang diharapkan mampu mengelola potensi lokal serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara kelembagaan, BUMDes Desa Sombo telah memiliki struktur organisasi dan pedoman dasar pengelolaan usaha. Keberadaan struktur tersebut menunjukkan bahwa secara administratif BUMDes telah memiliki dasar dalam menjalankan kegiatan usaha desa. Namun, dalam pelaksanaannya peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi perkembangan unit usaha yang dijalankan.

Berdasarkan kondisi di lapangan, pengelolaan BUMDes Desa Sombo masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi kelembagaan maupun kegiatan usaha. Jumlah pengurus yang aktif masih terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan usaha belum sepenuhnya dapat dikelola secara mandiri oleh BUMDes. Dalam beberapa kegiatan, pelaksanaan usaha masih melibatkan bantuan dari pemerintah desa maupun kelompok masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes secara kelembagaan telah terbentuk, namun kapasitas pengelolaannya masih memerlukan penguatan agar mampu menjalankan fungsi usaha desa secara berkelanjutan.

Fenomena lain terlihat pada pengelolaan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes, khususnya usaha produk olahan beras kencur. Desa Sombo memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung pengembangan usaha tersebut, ditunjukkan dengan ketersediaan bahan baku lokal yang cukup melimpah serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan produksi. Produk beras kencur tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai budaya sebagai minuman tradisional yang masih dikenal oleh masyarakat. Kondisi ini memberikan peluang bagi desa untuk mengembangkan produk lokal yang mampu memberikan nilai tambah terhadap hasil pertanian masyarakat.

Meskipun demikian, pengembangan usaha produk olahan beras kencur di Desa Sombo masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, sistem pemasaran produk masih dilakukan secara sederhana dan belum terpusat melalui BUMDes. Sebagian masyarakat masih memasarkan produk secara mandiri melalui jaringan pribadi maupun media komunikasi sederhana. Sementara itu, keterlibatan BUMDes dalam kegiatan pemasaran lebih banyak terlihat pada saat adanya kegiatan bazar desa, pameran UMKM, maupun kegiatan tertentu yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam mengelola pemasaran produk desa masih bersifat situasional dan belum berjalan secara terencana.

Selain aspek pemasaran, kondisi kelembagaan BUMDes juga dipengaruhi oleh keterbatasan dukungan pengelolaan usaha, baik dari sisi sumber daya manusia maupun penguatan organisasi. Sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam usaha produk olahan beras kencur berasal dari kelompok usia dewasa dan lanjut usia yang telah memiliki pengalaman dalam proses produksi, namun masih memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana promosi maupun perluasan pasar. Kondisi tersebut menyebabkan pemasaran produk belum mampu menjangkau konsumen yang lebih luas dan masih berfokus pada lingkungan sekitar desa.

Di sisi lain, dukungan pemerintah desa terhadap keberlangsungan BUMDes mulai menunjukkan adanya perhatian melalui penyertaan modal dan fasilitasi kegiatan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peluang untuk berkembang menjadi lembaga ekonomi desa yang mampu mengelola potensi lokal secara lebih terarah. Namun, dukungan tersebut perlu diimbangi dengan strategi pengelolaan usaha, penguatan kelembagaan, serta keterlibatan sumber daya manusia yang memadai agar unit usaha yang dijalankan tidak hanya bersifat insidental, tetapi mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat desa.

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa Desa Sombo memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan yang dapat menjadi dasar dalam pengembangan usaha desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti

keterbatasan pengurus aktif, belum terbangunnya sistem pemasaran yang terorganisir, serta belum kuatnya peran BUMDes dalam mengelola unit usaha secara mandiri.

Ketertarikan peneliti untuk mengkaji pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sombo didasarkan pada adanya kesenjangan antara potensi desa yang cukup besar dengan kondisi pengelolaan usaha yang terjadi di lapangan. Desa Sombo memiliki potensi produk lokal berupa olahan beras kencur yang melibatkan masyarakat dalam proses produksi, namun pengelolaan usaha, penguatan kelembagaan, pengelolaan keuangan, serta pengembangan unit usaha melalui BUMDes masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan usaha produk olahan beras kencur di Desa Sombo Kabupaten Magetan, guna mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes dijalankan dalam memanfaatkan potensi lokal serta memberikan dampak bagi masyarakat desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi BUMDes dalam pengembangan usaha produk olahan beras kencur di Desa Sombo, Kabupaten Magetan?
2. Apakah permasalahan yang dihadapi oleh BUMDES dalam strategi pengembangan usaha produk olahan beras kencur di Desa Sombo, Kabupaten Magetan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mengetahui bagaimana strategi BUMDes dalam pengembangan usaha produk olahan beras kencur di Desa Sombo, Kabupaten Magetan.
2. Mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh BUMDES dalam strategi pengembangan usaha produk olahan beras kencur di Desa Sombo, Kabupaten Magetan.

D. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penjelasan mengenai unsur-unsur penelitian yang berfungsi untuk memberikan gambaran jelas terkait konsep maupun variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi ini bertujuan untuk

memperjelas batasan makna sehingga permasalahan diteliti dipahami dengan sistematis serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

1. Strategi Pengembangan

Strategi dapat dimaknai sebagai suatu proses perencanaan yang dirumuskan oleh pimpinan organisasi dengan menitikberatkan pada pencapaian tujuan jangka panjang. Dalam proses tersebut, disusun berbagai langkah, metode, serta upaya yang dirancang secara terarah agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Dengan kata lain, strategi berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah tindakan organisasi sekaligus memastikan bahwa rencana yang telah disusun mampu dilaksanakan secara efektif dan efisien. (Berliana, 2021)

Di sisi lain, pengembangan dapat dipahami sebagai suatu bentuk upaya pembinaan yang dilakukan baik melalui jalur formal maupun nonformal. Kegiatan ini dilaksanakan secara sadar dan direncanakan dengan baik, disusun secara sistematis, serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Upaya ini bertujuan untuk memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, serta meningkatkan kualitas individu, baik dari segi kepribadian, pengetahuan, maupun keterampilan, sehingga selaras dengan bakat, minat, serta kemampuan yang dimiliki.

Dengan demikian, strategi pengembangan didefinisikan proses dirancang guna meningkatkan efektivitas organisasi melalui penyelarasan antara kebutuhan individu untuk tumbuh dan berkembang dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi.

2. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk berlandaskan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Lembaga ini didirikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi ekonomi desa, baik yang berasal dari kelembagaan perekonomian, SDA maupun SDM dipunyai desa. Melalui pengelolaan potensi tersebut, BUMDes diharapkan mampu berperan saat mendorong kesejahteraan masyarakat desa. (Sidik, 2020)

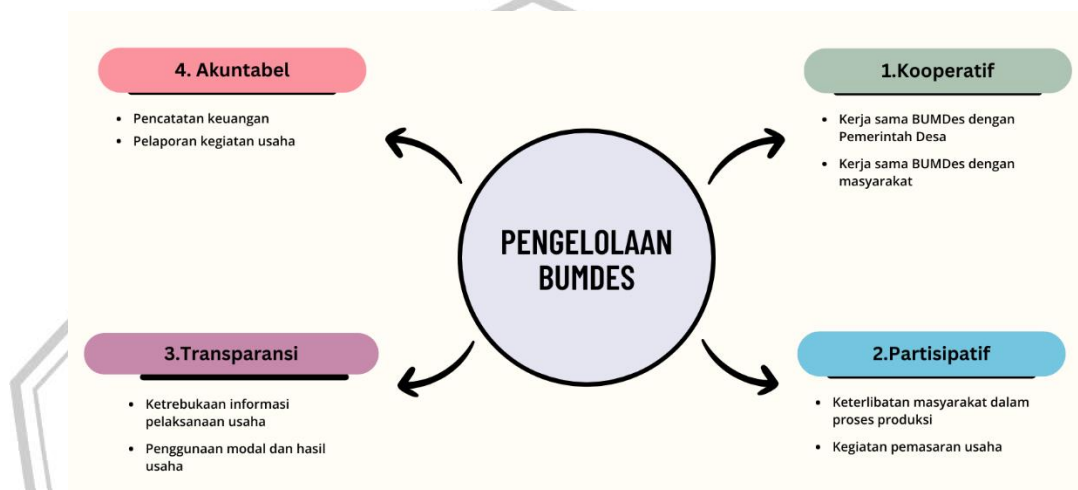
BUM Desa merupakan lembaga usaha modalnya sebagian besar maupun bahkan seluruhnya berasal dari desa. Modal tersebut diperoleh melalui penyertaan langsung yang bersumber dari kekayaan desa telah dipisahkan guna dikelola sebagai bagian dari kegiatan usaha desa. Modal tersebut kemudian digunakan untuk mengelola berbagai aset desa, menyediakan layanan usaha, serta menjalankan kegiatan ekonomi lainnya bertujuan memberikan kebermanfaatn kesejahteraan masyarakat desa. Secara kelembagaan, struktur organisasi BUMDes dibentuk secara mandiri dan terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa, sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara profesional tanpa mengganggu fungsi administratif pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaannya, BUMDes diwajibkan mempunyai Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga berfungsi atas dasar hukum sekaligus pedoman saat menjalankan kegiatan usaha. Anggaran Dasar setidaknya memuat beberapa informasi penting, seperti nama dan kedudukan BUMDes, tujuan serta maksud pendiriannya, status dan kepemilikan modal, bidang serta jenis usaha yang dijalankan, serta struktur dan mekanisme kepengurusan yang mengatur jalannya organisasi.

Sementara itu, Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya mengatur secara lebih teknis mengenai hak serta kewajiban pengurus, masa jabatan kepengurusan, prosedur pengangkatan serta pemberhentian pengurus, mekanisme operasional kegiatan usaha, sumber dan pengelolaan permodalan, serta pengaturan mengenai pembagian keuntungan dan penanganan kerugian. Selain itu, perubahan terhadap Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan paling singkat dalam jangka waktu satu tahun anggaran melalui rapat pengurus sebagai forum pengambilan keputusan. Selanjutnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan wajib mendapatkan pengesahan dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dilaporkan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bentuk pembinaan, pengawasan, dan tertib administrasi kelembagaan. (Ridlwani Zulkarnain, 2020)

Landasan teori yang digunakan peneliti dalam menentukan kerangka berpikir sebagai acuan, didasarkan pada teori pengelolaan BUMDes. Dalam teori tersebut disampaikan empat indikator penting dalam strategi pengelolaan BUMDes, yaitu kooperatif, partisipatif, transparansi, dan akuntabel. Keempat indikator tersebut kemudian digambarkan oleh peneliti dalam kerangka berpikir dibawah ini.

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir Teori



Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti

Kerangka berpikir sebagai landasan menganalisis bagaimana pengelolaan BUMDes dalam pengembangan usaha yang dijalankan. Berdasarkan gambar di atas, pengelolaan BUMDes menurut Buku Pedoman Pengelolaan BUMDes terdiri atas empat indikator utama, yaitu kooperatif, partisipatif, transparansi, dan akuntabel. Keempat indikator tersebut digunakan sebagai dasar dalam menilai bagaimana pengelolaan BUMDes dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, terbuka, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Indikator kooperatif menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes dilakukan melalui kerja sama antara BUMDes dengan pemerintah desa maupun masyarakat. Kerja sama dengan pemerintah desa diperlukan dalam bentuk dukungan kebijakan, pembinaan, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan. Selain itu, kerja sama dengan masyarakat juga menjadi hal penting karena masyarakat merupakan pihak yang ikut terlibat dalam pengembangan usaha desa. Dengan adanya hubungan kerja sama yang baik,

maka kegiatan usaha BUMDes dapat berjalan lebih lancar dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Selanjutnya, indikator partisipatif menggambarkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaan warga dalam proses produksi maupun kegiatan pemasaran usaha. Keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa BUMDes tidak hanya dikelola oleh pengurus saja, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan usaha desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin besar pula dukungan terhadap keberlangsungan dan perkembangan BUMDes.

Indikator transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam pengelolaan usaha BUMDes. Keterbukaan tersebut meliputi informasi mengenai pelaksanaan usaha, penggunaan modal, serta hasil usaha yang diperoleh. Transparansi sangat penting agar masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan usaha dilakukan dan dapat menumbuhkan rasa percaya kepada pengelola BUMDes. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui perkembangan usaha yang sedang dijalankan sehingga tercipta pengelolaan yang lebih jujur dan terbuka.

Sementara itu, indikator akuntabel menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat dilihat melalui pencatatan keuangan yang dilakukan secara tertib serta adanya pelaporan kegiatan usaha kepada pemerintah desa maupun masyarakat. Pencatatan dan pelaporan yang baik menjadi bentuk tanggung jawab pengelola dalam menjalankan usaha desa. Dengan adanya akuntabilitas, pengelolaan BUMDes dapat berjalan lebih profesional, teratur, dan dipercaya oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan indikator kooperatif, partisipatif, transparansi, dan akuntabel dalam pengelolaan BUMDes menjadi hal penting untuk mendukung keberhasilan usaha desa. Apabila keempat indikator tersebut diterapkan dengan baik, maka BUMDes dapat berkembang secara optimal serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa.

Kerangka berpikir ini digunakan sebagai acuan dalam pengumpulan data, analisis, serta penarikan kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan BUMDes dalam mendukung perekonomian desa.

E. Definisi Operasional

Penjelasan dari konsep maupun variabel penelitian yang diuraikan ke bentuk lebih jelas dan bersifat operasional. Penjabaran ini bertujuan agar variabel yang diteliti dapat dipahami secara lebih konkret serta menjadi pedoman bagi peneliti dalam menentukan langkah atau tindakan diperlukan guna mengukur variabel. Tujuan utama untuk memberikan batasan makna yang jelas, terarah, dan konsisten terhadap setiap istilah atau variabel yang digunakan dalam penelitian. Tanpa adanya definisi operasional yang tegas, suatu konsep dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh peneliti maupun pembaca, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dan memengaruhi keakuratan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, definisi operasional disusun dengan mengacu pada ketentuan dan landasan hukum berkaitan BUMDes. Dasar yang digunakan antara lain UU Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur mengenai BUMDes, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 perihal Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2014 serta mengacu pada konsep teoritis mengenai pengelolaan BUMDes yang dikemukakan oleh Maryunani, sehingga definisi operasional yang digunakan memiliki dasar hukum dan landasan teoritis yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Definisi operasional menjelaskan secara detail unsur-unsur yang perlu diukur dan diamati pada setiap variabel atau konsep penelitian sehingga proses pengujian dapat dilakukan dengan lebih akurat.

1. Kooperatif dalam pengelolaan BUMDes

1.1 Koordinasi antara pengurus BUMDes dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

- 1.2 Kerja sama antara pengurus BUMDes dengan masyarakat dalam pengelolaan usaha produk olahan beras kencur.
2. Partisipatif dalam pengelolaan BUMDes
 - 2.1 Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan produksi produk olahan beras kencur.
 - 2.2 Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengembangan dan pemasaran usaha yang dijalankan BUMDes.
3. Transparan dalam pengelolaan BUMDes
 - 3.1 Keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes.
 - 3.2 Keterbukaan informasi terkait penggunaan modal dan hasil kegiatan usaha.
4. Akuntabel dalam Pengelolaan BUMDes Blego Asri
 - 4.1 Pencatatan Administrasi dan Keuangan.
 - 4.2 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Usaha Produk Olahan Beras Kencur.

F. Metode Penelitian

Serangkaian prosedur maupun tahapan dimanfaatkan peneliti saat menghimpun informasi, memperoleh data, serta mengolah dan menganalisis data guna menjawab permasalahan penelitian. Dengan mengaplikasikan dengan tepat, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran jelas serta akurat selaras tujuan penelitian dengan pendekatan kualitatif, diartikan jenis penelitian digunakan memahami berbagai fenomena dialami subjek penelitian secara lebih mendalam, seperti perilaku, pandangan, motivasi, sekaligus perilaku keseharian

Penyajian data umumnya disampaikan dalam bentuk uraian atau deskripsi berupa kata-kata. Penjelasan tersebut disusun dengan sistematis menerapkan bahasa mudah dicerna serta ditempatkan dalam konteks yang alamiah, sehingga mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan dengan mengaplikasikan beragam pendekatan sesuai dengan situasi penelitian.

1. Jenis penelitian

Penelitian berjenis deskriptif kualitatif berfokus pada penggambaran kondisi maupun fenomena terjadi saat berlangsungnya penelitian. Proses penelitian berfokus mengumpulkan data, kegiatan pengolahan, analisis, penafsiran data, serta penarikan kesimpulan dan pemberian saran yang disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Metode penelitian digunakan atas upaya untuk menemukan dan menjelaskan solusi terhadap permasalahan diteliti selaras perumusan masalah dan tujuan penelitian. Diharapkan mampu menggambarkan atas pendekatan pengembangan BUMDes saat pengelolaan usaha produk olahan beras kencur di Desa Sombo. (Fadhillah et al., 2022)

2. Subjek Penelitian

Pihak atau objek yang menjadi fokus pengamatan dan kajian saat meneliti untuk mendapatkan informasi mendalam selaras topik diteliti. Subjek berupa pribadi, golongan, badan, ataupun objek tertentu yang dianggap mampu memberikan data yang relevan dan dibutuhkan. Keberadaan subjek penelitian sangat penting karena menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi yang akurat, faktual, dan dapat digunakan untuk mendukung keabsahan data didapatkan pada lapangan.

Subjek penelitian dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti serta kemampuannya dalam memberikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi nyata. Subjek penelitian dapat berupa pihak-pihak yang memiliki peran langsung dalam kegiatan yang diteliti maupun masyarakat yang merasakan dampaknya. Oleh karena itu, guna mendapatkan data valid serta komprehensif, subjek penelitian yang ditetapkan merupakan Ketua BUMDes, Sekretaris Desa Sombo, serta masyarakat Desa Sombo sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan aktivitas dan perkembangan BUMDes di desa tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Area pemrosesan data serta kolaborasi dengan informan penelitian atas pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sekaligus menjadi ruang bagi peneliti untuk berinteraksi secara langsung dengan subjek yang terlibat

dalam penelitian. Dilakukan pada Desa Sombo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

4. Sumber Data Penelitian

1) Data Primer

Data didapatkan secara spontan bersumber tangan pertama peneliti. Bentuk data didapatkan berasal hasil penelitian berupa hasil wawancara dengan Kepala Desa Sombo.

2) Data Sekunder

Data tidak diperoleh dengan spontan atas sumber utama, sebaliknya didapatkan atas perantara, seperti beragam sumber informasi yang tersedia, termasuk yang dapat diakses melalui internet. Data sekunder ini mencakup kategori catatan arsip, dokumen publik, laporan media dan data lainnya sebagai pendukung penelitian. Dalam hal ini data sekunder merupakan data diaplikasikan atas komplemen dari data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan bagian sangat penting saat proses meneliti karena berkaitan langsung dengan upaya memperoleh informasi yang diperlukan secara tepat dan dapat dipercaya. Pemilihan teknik mempermudah mendapatkan informasi relevan atas sasaran penelitian. Data tersebut kemudian dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam melakukan analisis serta menyusun simpulan penelitian (Fadhillah et al., 2022).

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik mengumpulkan data dilaksanakan menghimpun, mempelajari, serta mengkaji beragam dokumen berkaitan objek penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa catatan tertulis mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi, arsip, laporan kegiatan, foto, gambar, rekaman elektronik, maupun berbagai bentuk informasi lainnya, baik yang tersimpan secara resmi maupun tidak resmi.

Bertujuan mencukupi serta memperkuat data didapatkan atas sumber lain. Data dokumentasi yang dikumpulkan digunakan sebagai

bahan pendukung dalam memahami kondisi objek penelitian secara lebih mendalam. Dokumen yang dimanfaatkan dalam penelitian ini antara lain meliputi laporan produksi beras dan kencur per tahun, laporan kegiatan usaha, serta data lain yang berkaitan dengan aktivitas dan perkembangan usaha yang dikelola oleh BUMDes di Desa Sombo.

2. Wawancara

Proses ini peneliti dapat mendapatkan informasi dengan spontan dan lebih jelas berasal sumber yang bersangkutan. Metode ini dilakukan melalui kegiatan tanya jawab yang dapat berlangsung secara tatap muka maupun tidak tatap muka antara pihak pewawancara dan narasumber yang diwawancarai. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan wawancara secara sistematis kepada subjek penelitian guna memperoleh informasi yang lengkap, mendalam, serta relevan dengan kebutuhan penelitian. Kegiatan wawancara ini secara khusus bertujuan untuk menggali informasi yang lebih rinci mengenai Strategi BUMDes dalam upaya pengembangan ekonomi lokal, khususnya pada produk beras kencur di Desa Sombo. Selain itu, kegiatan wawancara juga bertujuan untuk menggali pemahaman mengenai sejauh mana strategi yang diterapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan serta perkembangan perekonomian masyarakat di desa.

Narasumber yang terlibat dalam proses wawancara ini meliputi Ketua BUMDes, Sekretaris Desa Sombo, serta perwakilan masyarakat Desa Sombo yang dianggap memiliki informasi relevan dan representatif terhadap kondisi lapangan.

3. Observasi

Dilaksanakan melalui kegiatan pengamatan dengan langsung dan terencana terhadap objek penelitian. Peneliti mendapatkan informasi nyata berkaitan keadaan, situasi, maupun berbagai aktivitas yang berlangsung di lokasi penelitian.

Menurut Creswell (Hendri, 2018), observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat terbuka (open-ended), sehingga

peneliti dapat memahami perilaku manusia serta berbagai peristiwa yang berlangsung di tempat penelitian secara lebih mendalam dan kontekstual.

Pelaksanaan observasi tidak hanya terbatas pada kegiatan melihat semata, tetapi juga mencakup pencatatan secara terstruktur terhadap berbagai kejadian, perilaku, interaksi, serta objek-objek yang diamati. Selain itu, peneliti juga mendokumentasikan hal-hal penting lain yang dianggap relevan dan mampu mendukung kelengkapan data penelitian. Dengan demikian, observasi menjadi metode yang sangat penting karena mampu memperkuat hasil wawancara serta memberikan validasi langsung terhadap fenomena yang sedang diteliti. Pengamatan dilaksanakan agar mendapatkan informasi terkait strategi bumdes dalam meningkatkan perekonomian di Desa Sombo. (Irsyana & Risky Kawasati (2012)

6. Teknik Analisis Data

Tahap terakhir dalam rangkaian proses penelitian adalah teknik analisis data. Tahapan ini merupakan langkah penting yang bertujuan untuk mengolah dan menata data secara sistematis, terstruktur, dan selaras dengan persoalan penelitian yang telah ditetapkan. Melalui proses analisis, data dikumpulkan disajikan, ditafsirkan sehingga mampu memberikan jawaban yang relevan terhadap fokus penelitian.

Penelitian kualitatif dilaksanakan dengan induktif, yaitu memulai proses analisis dari data yang diperoleh langsung di lapangan. Data tersebut kemudian dikaji dan diolah hingga membentuk pola tertentu, diklasifikasikan ke dalam kategori, dan pada akhirnya menghasilkan kesimpulan atau dugaan sementara. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak berangkat dari teori yang ingin dibuktikan, tetapi berusaha menyusun pemahaman berdasarkan fakta serta temuan yang muncul selama proses penelitian berlangsung.

Menurut Icam Sutisna (2020), dalam analisis data kualitatif, peneliti melakukan pengelolaan data dengan cara mengorganisasikan, mengelompokkan, menganalisis informasi berbagai sumber. Data tersebut

selanjutnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori agar karakteristik masing-masing data dapat dipahami dengan lebih jelas. Dengan demikian, proses analisis akan memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi, menelaah, serta menemukan solusi atas permasalahan yang sedang diteliti.

Selanjutnya, menurut pandangan Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif berfokus pada reduksi, penyajian, dan penyimpulan data.. Ketiga tahap tersebut tidak dilakukan secara terpisah, melainkan berlangsung secara terus-menerus sepanjang proses penelitian. Melalui tahapan yang saling berkaitan ini, hasil analisis yang diperoleh menjadi lebih mendalam, tersusun secara sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut Miles dan Huberman, tahapan analisa data berupa:

A. Reduksi Data

Aktifitas memilah, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengolah kembali data awal diperoleh bersumber hasil penelitian di lapangan. Data tersebut dapat berupa berbagai bentuk, seperti catatan lapangan, hasil transkrip wawancara, dokumen, maupun bahan empiris lainnya berkorelasi dengan penelitian. Peneliti menyeleksi informasi yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, kemudian mengelompokkan dan merangkum data tersebut agar lebih terarah.

Dengan kata lain, reduksi data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara maupun data tertulis di lapangan. Transkrip wawancara yang telah diperoleh kemudian dipilah, dikategorikan, dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Proses ini bertujuan agar data yang digunakan benar-benar mendukung fokus permasalahan yang diteliti, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih efektif dan terstruktur.

B. Penyajian Data

Tahap ketika informasi sebelumnya sudah melalui proses reduksi diatur dan disusun kembali secara lebih terstruktur agar lebih mudah dipahami. Data yang sudah diklasifikasikan kemudian ditampilkan

dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, seperti uraian deskriptif, tabel, maupun bentuk penyajian lain yang dianggap relevan.

Melalui proses penyajian tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai temuan penelitian yang didapatkan. Selain itu, tahap ini juga membantu peneliti untuk memahami situasi dan konteks penelitian secara lebih mendalam, karena data yang tersusun secara rapi akan mempermudah proses penafsiran sekaligus mendukung analisis lanjutan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

C. Penarikan simpulan

Peneliti berupaya memahami serta menafsirkan data yang sebelumnya telah disusun dan disajikan. Melalui proses tersebut, peneliti dapat menemukan arti dari data yang diperoleh, mengenali pola yang muncul, melihat kemungkinan hubungan sebab dan akibat, serta memahami korelasi tiap informasi.

Proses ini dilakukan secara bertahap sejak pertama mengumpulkan data sampai terselesainya penelitian, sehingga simpulan tersebut berdasarkan pada fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

Dengan demikian, kesimpulan yang ditarik tidak bersifat mendadak, tetapi merupakan dampak analisis sistematis, mendalam, dan berkesinambungan terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung.